



**DISKAN  
KOTA DUMAI**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif


**# bangga  
melayani  
bangsa**


# DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI

## TAHUN 2025

### <sup>A</sup>RENJA PERUBAHAN



 [diskan.dumaikota.go.id](http://diskan.dumaikota.go.id)

 0765-4300498

 [dinasperikanan.kotadumai](https://www.instagram.com/dinasperikanan.kotadumai)

JL. Dermaga No.08 Purnama, Dumai



**WALIKOTA DUMAI**  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Blanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025 berdasarkan peraturan Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
  3. Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 8 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 8 Seri D)

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat diubah dengan adanya Perubahan kebijakan baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun ditingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD, penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD dan terdapat perubahan dan/ atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025.

- (4) Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025;
  - b. pedoman penyempurnaan Renja Perubahan PD Tahun 2025.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
  - c. BAB III : Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. BAB V : Rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
  - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 1 Juli 2025



Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 1 Juli 2025



BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR (16, SERI D)

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025 disusun sebagai arahan pelaksanaan tupoksi seluruh jajaran Dinas Perikanan Kota Dumai yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja.

Diharapkan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025 ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama di bidang perikanan di Kota Dumai pada masa sekarang dan yang akan datang.

Dumai, 4 Juli 2025



KETALA DINAS PERIKANAN  
KOTA DUMAI,

**H. APRILAGAN, S.H, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19720412 200112 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....	6
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan .....	6
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....	18
BAB IV PENUTUP .....	38

## DAFTAR TABEL

2.1	Formulir E.60 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Dumai Dinas Perikanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 .....	7
2.2	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	10
2.3	Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap .....	12
2.4	Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya .....	13
2.5	Capaian Kinerja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan .....	14
2.6	Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II .....	15
3.1	Pemetaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 .....	19
3.2	Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai .....	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja memiliki kedudukan strategis dalam menjebatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Dumai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan disetiap tahun anggaran. Pada tahun 2025 ini, Dinas Perikanan Kota Dumai menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan sesuai dengan situasi perkembangan, yang meliputi:

1. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran berlebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
2. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2025;
3. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambagan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025 disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dengan adanya acuan tersebut, perubahan Renja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 7 Seri E);
  9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
  10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
  11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Sei E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Sei E);

12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri D);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud disusunnya dokumen perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2025 ini sebagai acuan antara penyusunan perencanaan program pembangunan, penganggaran serta pengawasan pembangunan Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026 guna terwujudnya efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran dalam pembangunan.

Tujuan penyusunan perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan Dinas Perikanan Kota Dumai dalam sinkronisasi RKPD Kota Dumai Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai dalam mencapai visi dan misi pemerintah Kota Dumai;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025; dan
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Bentuk penyajian perubahn Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2025 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Dumai Tahun 2021-2026. Berdasarkan hal tersebut, perubahan Renja Tahun 2025 disusun secara sistematis sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Pelaksanaan evaluasi dilakukan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025. Pelaksanaan evaluasi Renja dilakukan guna untuk mengetahui :

- 1) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/subkegiatan;
- 2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra; dan
- 3) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

#### **2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan**

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan Dinas Perikanan Kota Dumai. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja menjelaskan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2025 dengan memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menggambarkan tentang pencapaian kinerja.

Sampai dengan akhir Juni Triwulan II Tahun 2025, penyerapan anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai masih sangat rendah, yaitu sebesar 33,61% untuk realisasi keuangan dan realisasi fisik sebesar 37,84%. Hal ini disebabkan karena kondisi keuangan 2025 belum stabil dan masih fokus dengan pembayaran tunda bayar tahun 2024. Adapun hasil pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Formulir E.60**  
**Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Dumai**  
**Dinas Perikanan Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025**

No	Sasaran RKPD		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kab/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13		14=13/8x100%				15 = 7 + 13		16=15/6 x100%	
1	2		3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=13/8x100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		17	18
	KO	P				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			3.25	Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan																									
			3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan	100	39.438.389.0251	100%	20.027.911.053	4.442.711.985	755.172.002	1.058.515.954	-	-	1.813.687.956	40,82%	21.841.599.009	55,38%											
			3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	41	545.114.113	16	606.434.113	7	Dokumen	44.500.000	-	-	5.680.000	12,76%	612.114.113	114,82%											
			3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	12.000.000	0	-	3	Dokumen	1.500.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
			3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	533.114.113	16	606.434.113	4	Laporan	43.000.000	-	1,00	5.680.000	25,00%	612.114.113	114,82%	17,00	612.114.113	85,00%	114,82%							
			3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	1	17.816.499.379	4	11.634.730.860	1	Dokumen	2.865.785.640	-	-	1.102.076.551	38,46%	12.736.807.411	71,49%											
			3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25	17.816.499.379	22	11.634.730.860	17	orang/bulan	2.865.785.640	3,00	560.835.990	4,00	1.102.076.551	41,18%	12.736.807.411	116,00%	29,00	12.736.807.411	116,00%	71,49%						
			3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	10	435.000.000	8	209.387.000	2	Dokumen	53.059.674	-	-	26.580.000	50,09%	235.967.000	54,25%											
			3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10	435.000.000	8	209.387.000	2	Dokumen	53.059.674	-	1,05	26.580.000	52,50%	235.967.000	90,50%	9,05	235.967.000	90,50%	54,25%							
			3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	615.000.000	1	25.253.000	1	Dokumen	51.756.000	-	-	5.000.000	9,66%	30.253.000	4,92%											
			3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	615.000.000	4	25.253.000	6	Orang	51.756.000	-	1,00	5.000.000	16,67%	30.253.000	20,00%	5,00	30.253.000	20,00%	4,92%							

DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI

No	Sasaran RKP		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kab/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket				
						6		7		8		9		10		11		12		13		14=13/8x100%		15 = 7 + 13				16=15/6 x100%		17	18
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
			<b>3.25.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>30</b>	<b>4.517.790.461</b>	<b>24</b>	<b>1.473.549.401</b>	<b>6</b>	<b>Dokumen</b>	<b>364.843.348</b>	<b>325.000</b>		<b>171.310.538</b>					<b>171.635.538</b>		<b>47,04%</b>	<b>1.645.184.939</b>		<b>18,05%</b>						
			3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	159.068.228	16	25.227.400	4	Paket	8.778.950		2,00	3.477.600					2,00	3.477.600	50,00%	39,61%	18,00	28.705.000	90,00%	18,05%				
			3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	1.479.834.683	16	542.078.317	4	Paket	138.979.267		3,00	95.843.968					3,00	95.843.968	75,00%	68,96%	19,00	637.922.285	95,00%	43,11%				
			3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	150.000.000	0	-	4	Paket	15.123.325								-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
			3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	156.578.200	16	57.897.000	4	Paket	9.600.000								-	-	0,00%	0,00%	16,00	57.897.000	80,00%	36,98%				
			3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	195.896.300	16	53.697.710	4	Paket	19.012.836		2,10	9.853.000					2,10	9.853.000	52,50%	51,82%	18,10	63.550.710	90,50%	32,44%				
			3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5	53.230.000	4	22.028.000	1	Dokumen	5.919.000	0,06	325.000	0,22	1.300.000				0,28	1.625.000	28,00%	27,45%	4,28	23.653.000	85,60%	44,44%				
			3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	2.323.183.050	4	772.620.974	1	Laporan	167.429.970		0,40	60.835.970					0,40	60.835.970	40,00%	36,34%	4,40	833.456.944	88,00%	35,88%				
			<b>3.25.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10</b>	<b>4.518.000.2000</b>	<b>103</b>	<b>724.977.936</b>	<b>90</b>	<b>Unit</b>	<b>72.880.000</b>										<b>0,00%</b>	<b>724.977.936</b>		<b>16,05%</b>						
			3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	1.110.000.000	2	169.060.000	2	Unit	72.880.000								-	-	0,00%	0,00%	2,00	169.060.000	40,00%	15,23%				
			3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15	1.877.000.000	8	198.550.000		Unit	-								-	-	0,00%	0,00%	8,00	198.550.000	53,33%	10,58%				
			3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	67	585.000.000	82	98.650.000	82	unit	-								-	-	0,00%	#DIV/0!	82,00	98.650.000	122,39%	16,86%				
			3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	416.000.000	10	58.836.000	6	unit	-								-	-	0,00%	#DIV/0!	10,00	58.836.000	76,92%	14,14%				

No	Sasaran RKP	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kab/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13		14=13/8x100%				15 = 7 + 13		16=15/6 x100%
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13		K	Rp	K	Rp	K	Rp	17	18	
	KO TA	P D			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	530.000.000	1	199.881.936	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	199.881.936	50,00%	37,71%			
			<b>3.25.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>15</b>	<b>7.194.288.954</b>	<b>12</b>	<b>4.069.452.833</b>	<b>3</b>	<b>Laporan</b>	<b>825.343.060</b>	<b>193.508.354</b>	<b>199.402.592</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>392.910.946</b>	<b>47,61%</b>	<b>4.462.363.779</b>	<b>36,73%</b>							
			3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	17.640.000	4	5.980.000	1	Laporan	1.300.000		0,40	500.000		0,40	500.000	40,00%	38,46%	4,40	6.480.000	88,00%	36,73%			
			3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	1.592.348.014	4	746.970.875	1	Laporan	197.000.000	0,23	44.915.524	0,25	47.113.002		0,48	92.028.526	48,00%	46,71%	4,48	838.999.401	89,60%	52,69%		
			3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	360.000.000	0	-	1	Laporan	18.235.000		0,20	2.700.000		0,20	2.700.000	20,00%	14,81%	0,20	2.700.000	6,67%	0,75%			
			3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5.224.300.940	4	3.316.501.958	1	Laporan	608.808.060	0,20	148.592.830	0,29	149.089.590		0,49	297.682.420	49,00%	48,90%	4,49	3.614.184.378	89,80%	69,18%		
			<b>3.25.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>31</b>	<b>3.796.696.344</b>	<b>25</b>	<b>1.284.125.910</b>	<b>18</b>	<b>Unit</b>	<b>164.544.263</b>	<b>502.658</b>	<b>109.302.263</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109.804.921</b>	<b>66,73%</b>	<b>1.393.930.831</b>	<b>48,96%</b>							
			3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	1.308.900.704	11	608.695.316	9	Unit	86.938.043	0	502.658	3,50	31.696.043		3,60	32.198.701	40,00%	37,04%	14,60	640.894.017	112,31%	48,96%		
			3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	392.000.000	9	67.121.070	8	Unit	-					-	-	0,00%	#DIV/0!	9,00	67.121.070	90,00%	17,12%			
			3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8	2.095.795.640	5	608.309.524	1	Unit	77.606.220		1,00	77.606.220		1,00	77.606.220	100,00%	100,00%	6,00	685.915.744	75,00%	32,73%			
			<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Cakupan kelompok nelayan terbina</b>	<b>100</b>	<b>Persentase</b>	<b>76,92%</b>	<b>1.951.554.065</b>	<b>84,61</b>	<b>Persentase</b>	<b>265.782.000</b>	<b>41.700.000</b>	<b>45.600.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87.300.000</b>	<b>32,85%</b>	<b>2.038.854.065</b>	<b>0,00%</b>							
			<b>3.25.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah perairan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya</b>	<b>2</b>	<b>765.000.000</b>	<b>2</b>	<b>437.000.300</b>	<b>-</b>	<b>Dokumen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>437.000.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

No	Sasaran RKP		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kab/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6		7		8				9				13		14=13/8x100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		17	18		
	KO	P																										
			3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3	520.000.000	2	407.650.300	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2,00	407.650.300	66,67%	78,39%				
			3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3	245.000.000	1	29.350.000	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	29.350.000	33,33%	11,98%				
			<b>3.25.03.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya</b>	<b>26</b>	<b>5.360.000.000</b>	<b>25</b>	<b>1.514.553.765</b>	<b>22</b>	<b>Kelompok</b>	<b>265.782.000</b>	<b>41.700.000</b>	<b>45.600.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87.300.000</b>	<b>32,85%</b>	<b>-</b>	<b>1.601.853.765</b>	<b>-</b>	<b>24,05%</b>				
			3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	46	1.650.000.000	60	374.719.400	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	60,00	374.719.400	13,04%	22,71%				
			3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	26	2.260.000.000	25	456.324.265	22	Kelompok	207.596.000	4,00	41.700.000	5,50	45.600.000	-	-	9,50	87.300.000	43,18%	42,05%	34,50	543.624.265	132,69%	24,05%		
			3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	15	1.450.000.000	7	683.510.100	-	Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	7,00	683.510.100	46,67%	47,14%				
			3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	30	2.335.000.000	0	-	10	Unit	58.186.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
			<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Cakupan kelompok aktif budidaya terbina</b>	<b>10</b>	<b>19.931.631.0400</b>	<b>79,07%</b>	<b>6.388.719.088</b>	<b>86,04</b>	<b>Persen</b>	<b>1.830.534.320</b>	<b>89.500.000</b>	<b>466.021.320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>555.521.320</b>	<b>30,35%</b>	<b>-</b>	<b>6.944.240.408</b>	<b>-</b>	<b>34,84%</b>				
			<b>3.25.04.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya</b>	<b>43</b>	<b>6.752.000.000</b>	<b>37</b>	<b>2.079.733.950</b>	<b>37</b>	<b>Kelompok</b>	<b>325.216.620</b>	<b>-</b>	<b>42.611.620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.611.620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.122.345.570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
			3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	43	4.727.000.000	30	1.459.531.800	13	Kelompok	282.605.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30,00	1.459.531.800	69,77%	30,88%				
			3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	43	360.000.000	20	<b>57.370.800</b>	20	Kelompok	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	#DIV/0!	20,00	57.370.800	46,51%	15,94%				
			3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	21	635.000.000	16	500.500.000	-	Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	16,00	500.500.000	76,19%	78,82%				

No	Sasaran RKP		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kab/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun Lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=13/8x100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		17	18		
	KO	P																												
	TA	D																												
			3.25.03.2.02.0004	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	40	1.030.000.000	25	62.331.350	25	Kelompok	42.611.620			25,00	42.611.620			25,00	42.611.620	100,00%	100,00%	50,00	104.942.970	125,00%	10,19%				
			3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen/laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	5	13.179.631.400	5	4.308.985.138	5	Dokumen	1.505.317.700			89.500.000	423.409.700					512.909.700		34,07%		4.821.894.838		76,12%			
			3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	3.961.731.400	1	2.789.341.868	1	Unit	734.965.400	0,05	44.100.000	0,26	182.067.000					0,31	226.167.000	31,00%	30,77%	1,31	3.015.508.868	131,00%	76,12%		
			3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	2.151.000.000	1	138.769.650	-	Unit	-										0,00%	0,00%	1,00	138.769.650	20,00%	6,45%			
			3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5	1.696.000.000	4	412.067.546	1	Dokumen	147.075.000			0,30	20.940.000					0,30	20.940.000	30,00%	14,24%	4,30	433.007.546	86,00%	25,53%		
			3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	40	1.610.000.000	300	309.327.600	250	Orang	221.047.000	50	41.700.000	60,00	45.600.000					110,00	87.300.000	44,00%	39,49%	410,00	396.627.600	102,50%	24,64%		
			3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	4	3.760.900.000	3	659.478.474	1	Dokumen	402.230.300	0	3.700.000	0,50	174.802.700					0,51	178.502.700	51,00%	44,38%	3,51	837.981.174	87,75%	22,28%		
			3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE WILAYAH SAMPEL AKI	100	4.499.292.0295	100	683.538.235	100	Persen	181.187.700			-	53.552.200					53.552.200		29,56%		737.090.435					
			3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	5	1.947.020.000	1	484.818.485	1	Dokumen	15.578.200				2.497.200					2.497.200				487.315.685					
			3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5	1.947.020.000	1	484.818.485	1	Dokumen	15.578.200			0,20	2.497.200					0,20	2.497.200	20,00%	16,03%	1,20	487.315.685	24,00%	25,03%		



Pada tahun 2025, Dinas Perikanan Kota Dumai melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.720.216.005,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus enam belas ribu lima rupiah). Sampai dengan 30 Juni 2025, realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 2.510.061.476,- (dua milyar lima ratus sepuluh juta enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 37,35% dengan capaian kinerja sebesar 40,01%. Adapun penjelasan secara rinci pelaksanaan program Dinas Perikanan Kota Dumai sampai dengan 30 Juni 2025 (triwulan II) adalah sebagai berikut.

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja dari program ini adalah persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dengan target tahun 2025 adalah sebesar 100%. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, realisasi kinerja adalah sebesar 43,41% dengan realisasi keuangan sebesar 40,82%. Program ini ditunjang dengan 8 (delapan) kegiatan dan 19 sub kegiatan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tingkat Capaian		Keterangan
			K	Rp	
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan</b>	<b>43,31%</b>	<b>40,82%</b>	
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>24,16%</b>	<b>12,76%</b>	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0%	0%	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan SPPD dalam daerah
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25%	13,21%	Laporan capaian kinerja sudah selesai, tinggal pencairan anggaran honorarium dan SPPD dalam daerah
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>41,18%</b>	<b>38,16%</b>	

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tingkat Capaian		Keterangan
			K	Rp	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41,18%	38,16%	Penggajian dan TPP ASN
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>52,50%</b>	<b>50,09%</b>	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	52,50%	50,09%	BMD dan RKBMD
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>16,67%</b>	<b>9,66%</b>	
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16,67%	9,66%	Disesuaikan dengan jadwal bimtek
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>51,32%</b>	<b>47,04%</b>	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50%	39,61%	Penyediaan komponen instalasi listrik
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75%	68,96%	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebutuhan rutin kantor
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0%	0%	Penyediaan peralatan kebersihan dan rumah tangga Dinas Perikanan
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0%	0%	Makan dan minum rapat
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	52,50%	51,82%	Cetak dan penggandaan kebutuhan dinas
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	28%	27,45%	Pembayaran koran
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40%	36,34%	Disesuaikan dengan jadwal undangan
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0%	0%	Pengadaan Motor untuk Ka UPT dan Ka Subbag TU UPT BAP
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48,11%</b>	<b>41,63%</b>	

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tingkat Capaian		Keterangan
			K	Rp	
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40%	38,46%	Penyediaan meterai
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48%	46,71%	Pembayaran listrik, Internet dan PDAM
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20%	14,81%	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49%	48,90%	Honorarium TKPK
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>68,30%</b>	<b>66,73%</b>	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40%	37,04%	Pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas
8.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	100%	Rehab ruangan program

Sumber: Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perikanan Kota Dumai (2025)

## 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan kelompok nelayan terbina dengan target tahun 2025 adalah sebesar 92,31%. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, capaian kinerja dari program ini adalah sebesar 33,73% dengan realisasi keuangan sebesar 32,85%. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tingkat Capaian		Keterangan
			K	Rp	
<b>I</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Cakupan kelompok nelayan terbina</b>	<b>33,73%</b>	<b>32,85%</b>	
<b>1</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh dan berkembang dan meningkat kelasnya</b>	<b>33,73%</b>	<b>32,85%</b>	

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tingkat Capaian		Keterangan
			K	Rp	
1.1	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	43,18%	42,05%	Pembinaan dan pendampingan KUB dan Honorarium TKPK
1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil	0%	0%	Hibah Kelompok Nelayan

Sumber: Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perikanan Kota Dumai (2025)

### 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan kelompok aktif budidaya terbina dengan target sebesar 92,5%. Sampai dengan triwulan II capaian program adalah sebesar 33,71% dengan realisasi keuangan sebesar 30,35%. Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan. Adapun rincian dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tingkat Capaian		Keterangan
			K	Rp	
<b>I</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Cakupan kelompok aktif budidaya terbina</b>	<b>33,71%</b>	<b>30,35%</b>	
<b>1</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang tumbuh dan berkembang dan meningkat kelasnya</b>	<b>13,10%</b>	<b>13,10%</b>	
1.1	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pegebangan kapasitas	0%	0%	Serah terima hibah masih dalam proses pelaksanaan
1.2	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	100%	100%	Pelatihan budidaya ikan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tingkat Capaian		Keterangan
			K	Rp	
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah dokumen/laporan pengelolaan pembudidayaan ikan</b>	<b>38,16%</b>	<b>34,07%</b>	
2.1	Penyediaan prasarana pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	31%	30,77%	Penyediaan sarana dan prasarana UPT Benih Ikan Air Tawar dan Honor TKPK
2.2	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	30%	14,24%	Uji kualitas air dan kegiatan stunting
2.3	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	44%	39,49%	Pembinaan dan pendampingan kelompok pembudidaya ikan dan Honor TKPK
2.4	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	51%	44,38%	Penyediaan sarana dan prasarana UPT Budidaya Air Payau, dan honor TKPK

Sumber: Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perikanan Kota Dumai (2025)

#### 4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Indikator kinerja dari program ini adalah persentase wilayah sampel AKI dengan target sebesar 100%. Sampai dengan triwulan II capaian program adalah sebesar 32,18% dengan realisasi keuangan sebesar 29,56%. Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun rincian dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Capaian Kinerja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tingkat Capaian		Keterangan
			K	Rp	
<b>1</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Berikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>20%</b>	<b>16,03%</b>	
1.1	Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil	20%	16,03%	Survey data Angka Konsumsi

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Tingkat Capaian		Keterangan
			K	Rp	
	perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko			Ikan Kota Dumai
<b>2</b>	<b>Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah dokumen penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	<b>33,33%</b>	<b>30,83%</b>	
2.1	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	33,33%	30,83%	Sosialisasi Gemarikan

Sumber: Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perikanan Kota Dumai (2025)

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2025. Anggaran tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.720.216.005 (enam milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus enam belas ribu lima rupiah). Sampai dengan 30 Juni 2025, realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 2.510.061.476,- (dua milyar lima ratus sepuluh juta enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) atau mencapai 37,35%. Adapun rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini.

**Tabel 2.6**  
**Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II (Rp)	%
<b>3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>			
<b>3.25</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>6.720.216.005</b>	<b>2.510.061.476</b>	<b>37,35</b>
<b>3.25.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota</b>	<b>4.442.711.985</b>	<b>1.813.687.956</b>	<b>40,82</b>
<b>3.25.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>44.500.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>12,76</b>
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	0	0
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.000.000	5.680.000	13,21
<b>3.25.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.865.785.640</b>	<b>1.102.076.551</b>	<b>38,46</b>
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.865.785.640	1.102.076.551	38,46

<b>Kode Rekening</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi s.d Triwulan II (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>3.25.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>53.059.674</b>	<b>26.580.000</b>	<b>50,09</b>
3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	53.059.674	26.580.000	50,09
<b>3.25.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>51.756.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>9,66</b>
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.756.000	5.000.000	9,66
<b>3.25.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>364.843.348</b>	<b>171.635.538</b>	<b>47,04</b>
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.778.950	3.477.600	39,61
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.979.267	95.843.968	68,96
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.123.325	0	0
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.600.000	0	0
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.012.836	9.853.000	51,82
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.919.000	1.625.000	27,45
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.012.000	60.835.970	36,34
<b>3.25.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.25.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.880.000	0	0
<b>3.25.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>825.343.060</b>	<b>329.910.946</b>	<b>47,61</b>
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000	500.000	30,77
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.000.000	92.028.526	46,71
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.235.000	2.700.000	14,81
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	608.808.060	297.682.420	40,81
<b>3.25.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>164.544.263</b>	<b>109.804.921</b>	<b>66,73</b>
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.938.043	32.198.701	37,04
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.606.220	77.606.220	100
<b>3.25.03</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>265.782.000</b>	<b>87.300.000</b>	<b>32,85</b>
<b>3.25.03.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>265.782.000</b>	<b>87.300.000</b>	<b>32,85</b>

<b>Kode Rekening</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi s.d Triwulan II (Rp)</b>	<b>%</b>
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	207.596.000	87.300.000	32,85
3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	58.186.000	0	0
<b>3.25.04</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>1.830.534.320</b>	<b>555.521.320</b>	<b>30,35</b>
<b>3.25.04.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>325.216.620</b>	<b>42.611.620</b>	<b>13,10</b>
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	282.605.000	0	0
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Kecil	42.611.620	42.611.620	100
<b>3.25.04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>1.505.317.700</b>	<b>512.909.700</b>	<b>34,07</b>
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	734.965.400	226.167.000	30,77
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	147.075.000	20.940.000	14,24
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	221.047.000	87.300.000	39,49
3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	402.230.300	178.502.700	44,38
<b>3.25.06</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>181.187.700</b>	<b>53.552.200</b>	<b>29,56</b>
<b>3.25.06.2.01</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>15.578.200</b>	<b>2.497.200</b>	<b>16,03</b>
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.578.200	2.497.200	16,03
<b>3.25.06.2.03</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>165.609.500</b>	<b>51.055.000</b>	<b>30,83</b>
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	165.609.500	51.055.000	30,83

Sumber: Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perikanan Kota Dumai (2025)

### **BAB III**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kota Dumai. Proses penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana tertuang pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Dinas Perikanan Kota Dumai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan dokumen perubahan Renja dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan memperhatikan isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi dalam upaya pencapaian target dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan hasil evaluasi (Tabel 2.1), perubahan Renja tahun 2025 memuat perubahan dan pergeseran anggaran kegiatan. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025 harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan regulasi tersebut, maka telah dilakukan penyesuaian/pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berbasis kinerja dan tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Berikut hasil pemetaan rancangan perubahan rencana kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2025 (Tabel 3.1).

Tabel 3.1  
Pemetaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota  
Dumai Tahun Anggaran 2025

<b>PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintah daerah</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

<b>PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Cakupan kelompok nelayan terbina</b>
<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Kelompok Nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya</b>
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaannya
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Cakupan kelompok aktif budidaya terbina</b>
<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya</b>
Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

<b>PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Persentase wilayah sampel aki</b>
<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan</b>
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko
<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah kelompok bahan baku industri Pengolahan Ikan yang disalurkan</b>
Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perikanan Kota Dumai (2025)

Jumlah anggaran yang telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 6.720.216.005,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus enam belas ribu lima rupiah). Namun, pada tahun ini, Dinas Perikanan Kota Dumai tidak mendapat pagu tambahan perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025. Rancangan program, kegiatan, dan sub kegiatan perubahan rencana kerja tahun anggaran 2025 serta pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

## Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1		DINAS PERIKANAN							10.540.215.460,00	6.948.404.000,00	6.720.216.005,00	-3.819.999.455,00						13.271.000.000,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						10.540.215.460,00	6.948.404.000,00	6.720.216.005,00	-3.819.999.455,00						13.271.000.000,00			
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						10.540.215.460,00	6.948.404.000,00	6.720.216.005,00	-3.819.999.455,00						13.271.000.000,00			
1,	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				100 %	100 %	5.448.333.480,00	4.291.919.914,00	4.442.711.985,00	1.307.666.520,00					6.756.000.000,00			
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13 Dokumen	7 Dokumen	99.881.500,00	85.337.818,00	44.500.000,00	-55.381.500,00			04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Perikanan	105.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4.031.500,00	3.430.000,00	1.500.000,00	-2.531.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAERAH		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP D 2025	AP BD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	95.850.000,00	81.907.818,00	43.000.000,00	-52.850.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000,00	2.585.752,76	2.865.785,64	-334.214.360,00						Dinas Perikanan		3.723.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	19 Orang/bulan	3.200.000,00	2.585.752,76	2.865.785,64	-334.214.360,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				3.723.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6 Dokumen	2 Dokumen	74.096.500,00	50.206.250,00	53.059.674,00	-21.036.826,00						Dinas Perikanan		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	74.096.500,00	50.206.250,00	53.059.674,00	-21.036.826,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	145.362.000,00	62.636.000,00	51.756.000,00	-93.606.000,00						Dinas Perikanan		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	5 Orang	145.362.000,00	62.636.000,00	51.756.000,00	-93.606.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				6 Dokumen	7 Dokumen	572.769.993,00	449.968.746,00	364.843.348,00	-207.926.645,00						Dinas Perikanan		795.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJATAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJATAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP D 2025	AP BD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	7.801.350,00	7.282.600,00	8.778.950,00	977.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	249.882.143,00	179.350.321,00	138.979.267,00	-110.902.876,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	25.578.800,00	22.188.125,00	15.123.325,00	-10.455.475,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	24.000.000,00	17.600.000,00	9.600.000,00	-14.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	22.633.700,00	19.439.700,00	19.012.836,00	-3.620.864,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.434.000,00	7.434.000,00	5.919.000,00	-1.515.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJATAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJATAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKP D 2025	AP BD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1							1 Laporan	1 Laporan	235.440.000,00	196.674.000,00	167.429.970,00	-68.010.030,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				15 Unit	2 Unit	321.300.900,00	127.372.700,00	72.880.000,00	-248.420.900,00			-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGA RAAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGA RAAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Perikanan		430.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	72.880.000,00	72.880.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGA RAAAN PEMERINTAHAN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGA RAAAN PEMERINTAHAN DAERAH		180.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	134.475.600,00	36.750.000,00	0,00	-134.475.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	0 Unit	186.825.300,00	90.622.700,00	0,00	-186.825.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJATAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJATAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUAH	RKP D 2025	AP BD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	892.149.500,00	815.015.640,00	825.343.060,00	-66.806.440,00			-	-	Dinas Perikanan		1.073.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	-200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	201.950.000,00	197.000.000,00	197.000.000,00	-4.950.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			330.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	33.490.000,00	20.305.000,00	18.235.000,00	-15.255.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	655.209.500,00	596.510.640,00	608.808.060,00	-46.401.440,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			700.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				34 Unit	14 Unit	142.773.087,00	115.630.000,00	164.544.263,00	21.771.176,00			-	-	Dinas Perikanan		330.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	142.773.087,00	115.630.000,00	86.938.043,00	-55.835.044,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJANRENJAOPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJAOPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	77.606.220,00	77.606.220,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGA RAN PEMERINTAH AN DAERAH 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGA RAN PEMERINTAH AN DAERAH			180.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2,	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	CAKUPAN KELOMPOK NELAYAN TERBINA				92,31 %	92,31 %	626.705.600,00	388.188.000,00	265.782.000,00	1.273.294.400,00							1.900.000.000,00	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya				24 kelompok	24 kelompok	626.705.600,00	388.188.000,00	265.782.000,00	-360.923.600,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Nelayan Kecil Kota Dumai			1.900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP D 2025	AP BD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				60 Orang	0 Orang	217.398.000,00	0,00	0,00	-217.398.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya				24 Kelompok	24 Kelompok	249.307.600,00	228.188.000,00	207.596.000,00	-41.711.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			600.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP D 2025	AP BD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembedayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				10 Unit	10 Unit	160.000.000,00	160.000.000,00	58.186.000,00	-101.814.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			1.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3,	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	CAKUPAN KELOMPOK AKTIF BUDIDAYA TERBINA				92,5 %	92,5 %	4.007.460,88 0,00	2.045.181,00 0,00	1.830.534,32 0,00	77.539.120,00						4.085.000,00 0,00		
	3.25.04.2.02	Pembedayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya				40 Kelompok	40 Kelompok	2.093.844,90 0,00	427.590.000,00	325.216.620,00	1.768.628.280,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pembudidaya Ikan Kecil Kota Dumai		1.475.000,00 0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANRENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				2 Kelompok	8 Kelompok	1.933.023.800,00	427.590.000,00	282.605.000,00	-1.650.418.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			1.225.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						25 Kelompok	25 Kelompok	160.821.100,00	0,00	42.611.620,00	-118.209.480,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			250.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP D 2025	AP BD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah dokumen pengelolaan pembudidayaan ikan				7 Dokumen	4 Dokumen	1.913.615.980,00	1.617.591.000,00	1.505.317.700,00	-408.298.280,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Pembudidayaan Ikan		2.610.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	681.198.400,00	642.148.400,00	734.965.400,00	53.767.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKP D 2025	AP BD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
																					16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	212.095.000,00	142.200.000,00	147.075.000,00	-65.020.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			450.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																				
			Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				250 Unit	250 Unit	235.596.000,00	222.480.000,00	221.047.000,00	-14.549.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			450.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANRENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP D 2025	AP BD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	784.726.580,00	610.762.600,00	402.230.300,00	-382.496.280,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			810.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4,	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE WILAYAH SAMPEL AKI				100 %	100 %	457.715.500,00	223.115.086,00	181.187.700,00	72.284.500,00							530.000.000,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	26.497.200,00	18.109.286,00	15.578.200,00	-10.919.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		280.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP D 2025	AP BD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	26.497.200,00	18.109.286,00	15.578.200,00	-10.919.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		280.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	431.218.300,00	205.005.800,00	165.609.500,00	-265.608.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	250.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANRENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP D 2025	AP BD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Ton	1 Ton	431.218.300,00	205.005.800,00	165.609.500,00	-265.608.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN		250.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
JUMLAH									10.540.215.460,00	6.948.404.000,00	6.720.216.005,00	-					13.271.000.000,00			

Sumber: Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perikanan Kota Dumai (2025)

Berdasarkan Tabel 3.2, tidak terjadi penambahan anggaran pada sub kegiatan. Walaupun tidak ada penambahan, perlu dilakukan revisi ulang terhadap anggaran, yaitu sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni tahun 2025 terjadi serah terima SK PPPK Tahap I Pemerintah Kota Dumai. Namun gaji yang dianggarkan hanya 3 (tiga) bulan, dan perlu dilakukan penambahan anggaran untuk mencukupkan gaji TKPK Dinas Perikanan Kota Dumai
2. Perlu adanya penyesuaian pemberian tunjangan kinerja CPNS. CPNS Tahun 2025 yang ada di Dinas Perikanan merupakan CPNS Fungsional dengan grade 8. Sedangkan tunjangan kinerja yang tersedia hanya untuk tunjangan fungsional umum.
3. Dikarenakan ada penambahan PPPK dan CPNS Tahun 2025, kebutuhan meja dan kursi juga meningkat. Kondisi mebeleur Dinas Perikanan dalam keadaan rusak berat dan tidak bisa diperbaiki. Kedepannya Dinas Perikanan membutuhkan tambahan anggaran untuk pemeneuhan mebeleur.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada dasarnya, perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Dokumen perubahan ini disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai dan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Selain memperhatikan keselarasan, dokumen perubahan ini disusun supaya isu dan permasalahan Kota Dumai secara umum dapat diselesaikan dan seluruh target tujuan dan sasaran tercapai dengan baik.

Dumai, 4 Juli 2025



KEPALA DINAS PERIKANAN  
KOTA DUMAI

**H. AFRILAGAN, S.H, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19720412 200112 1 003